



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP



Tahun
2021

Pemalang
puséré Jawa

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Adapun ringkasan prestasi kinerja Dinas Perhubungan yang dicapai di tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat

Indikator : Prosentase ketersediaan angkutan umum

Pada akhir RPJMD Tahun 2016-2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang menargetkan 9,18% untuk indikator Prosentase ketersediaan angkutan umum. Pada tahun 2021 adalah siklus pertama 5(lima) tahunan dari target yang ditentukan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang pada tahun 2021 menargetkan 3,30% dengan realisasi 3,30%. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Prosentase ketersediaan angkutan umum untuk tahun 2021 adalah sebesar 100,00%.

- b. Sasaran 2 : Meningkatnya infrastruktur, sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan

Indikator : Prosentase tersedianya terminal angkutan penumpang yang tersedia di Kabupaten

Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang menargetkan 100% untuk indikator Prosentase tersedianya terminal angkutan penumpang yang tersedia di Kabupaten Adapun realisasinya adalah sebesar 100% Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Prosentase tersedianya terminal angkutan penumpang yang tersedia di Kabupaten untuk tahun 2021 adalah sebesar 100 %.

- c. Sasaran 2 : Meningkatnya infrastruktur, sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan

Indikator : Presentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas

- d. Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang menargetkan 60% untuk indikator Presentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas Adapun realisasinya adalah sebesar 63% Berdasarkan hal tersebut,

maka capaian indikator Presentase ketersediaan rambu- rambu lalu lintas untuk tahun 2021 adalah sebesar 105 %.

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terdiri dari 2 target, yaitu:

- a. Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.

Pada tahun 2021, ditargetkan sebesar 0,29 % dan terealisasi sebesar

0,27 %

- b. Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas

Pada tahun 2021, angka kematian yang terjadi karena kejadian kecelakaan yaitu sebanyak 119 korban.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui

Pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang untuk tahun-tahun selanjutnya. Hal tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan angkutan yang mudah diakses serta nyaman dan Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan konvensional yang sudah ada serta memenuhi protokol Kesehatan
2. Pembuatan maspterplan lalu lintas secara bertahap
3. Menganggarkan Kembali pengadaan sarana prasarana perlengkapan jalan di tahun berikutnya.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini penting untuk dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021 disusun berdasarkan Pejanjian Kinerja Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap perangkat daerah. Laporan ini juga memiliki fungsi sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran atas tingkat pencapaian perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilandan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan hingga di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021, baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang ini, dapat memberikan manfaat yang optimal.

PEMALANG, 3 JANUARI 2022
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PEMALANG



Drs. MU' MINUN., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19680526 199403 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	Vi
LAMPIRAN.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum.....	2
1. Struktur Organisasi.....	3
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
B. Isu Strategis.....	6
C. Keuangan.....	7
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	8
A. Perencanaan Strategis.....	8
1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	8
2. Strategi dan Arah Kebijakan	9
B. Perjanjian Kinerja.....	10
C. Rencana Anggaran.....	11
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. Capaian Kinerja Utama.....	15
B. Akuntabilitas Anggaran.....	20
1. Realisasi Anggaran.....	20
2. Analisis Efisiensi Sumber Daya.....	21
C. Inovasi.....	22
BAB IV : PENUTUP.....	24

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja.....	9
Tabel 2.2 Tabel Sasaran dan Program	9
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama.....	10
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	11
Tabel 2.5 Target Belanja APBD Perubahan Tahun 2021.....	11
Tabel 2.6 Target Belanja APBD Perubahan Tahun 2021.....	13
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja atas Perjanjian Kinerja	16
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis	21

BAB 1

Pendahuluan

A. Gambaran Umum

1. Struktur Organisasi
2. Tugas Pokok & Fungsi

B. Isu Strategis

C. Keuangan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021 diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang.
2. Mendorong Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A. GAMBARAN UMUM

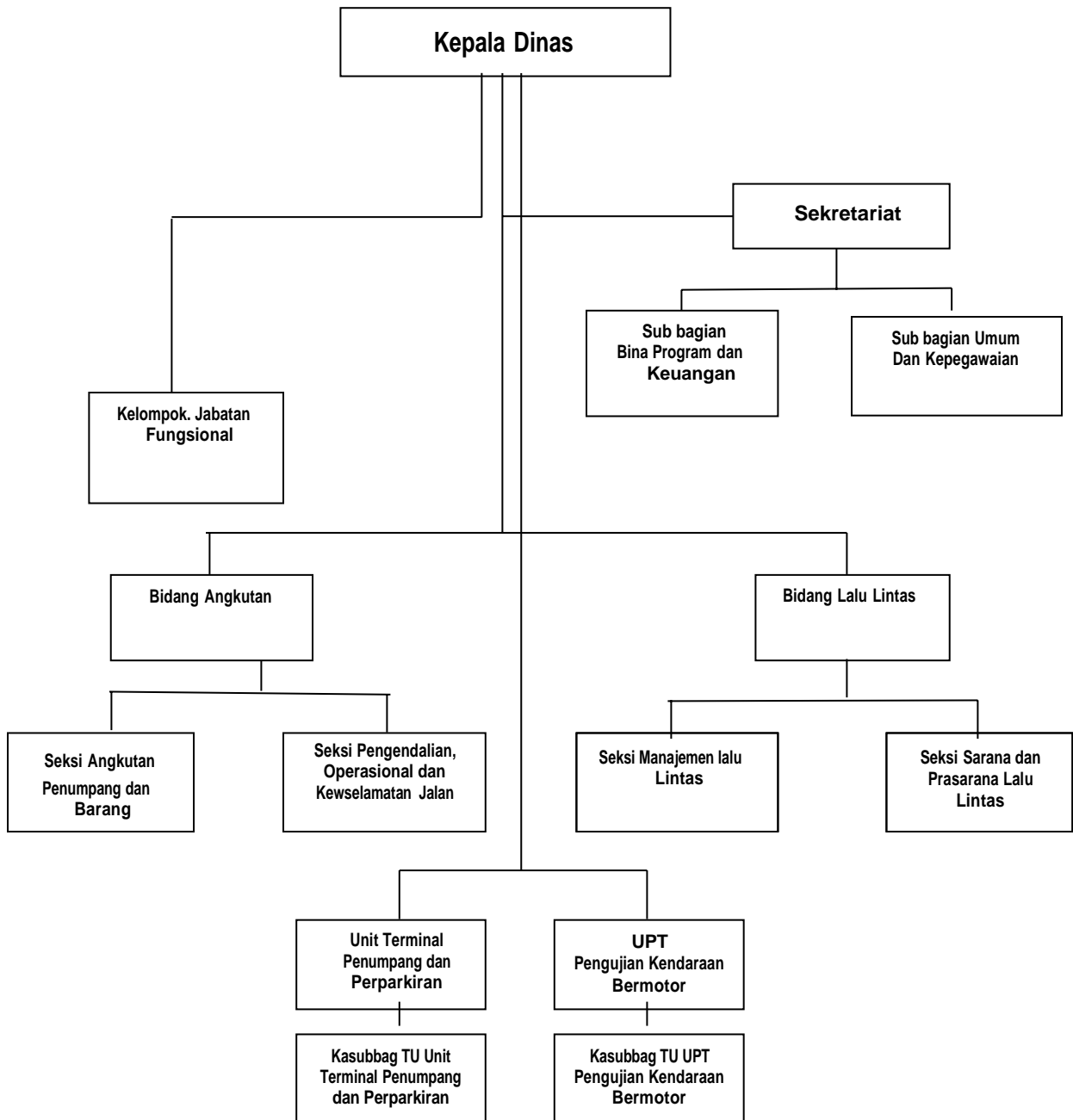
1. Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, Perbup No 72 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dan Perbup No 73 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Bina Program dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Angkutan terdiri dari :
 - Seksi Angkutan Penumpang dan Barang
 - Seksi Pengendalian, Operasional dan Keselamatan Jalan
- d. Bidang Lalu Lintas terdiri dari :
 - Seksi Manajemen Lalu Lintas
 - Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
- e. Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran
 - Kasubbag TU Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran
- f. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
 - Kasubbag TU Unit Pengujian Kendaraan Bermotor
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang selengkapnya diilustrasikan sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang



- ❖ UTP = Unit Terminal Penumpang
- ❖ UPT = Unit Pelaksana Teknis

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang dengan komposisi sebagai berikut :

a. Struktur

Jumlah PNS di Dinas Perhubungan, Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

1) Jumlah Struktural :		
a) Eselon II/B	:	1 orang
b) Eselon III/A	:	1 orang
c) Eselon III/B	:	2 orang
d) Eselon IV/A	:	8 orang
e) Eselon IV/B	:	2 orang
2) Jumlah Fungsional Tertentu	:	4 orang
3) Jumlah Jabatan Fungsional Umum	:	55 orang
J U M L A H	:	73 orang

b. Pangkat/Golongan Ruang

1) Pembina Utama Muda (IV/c)	:	1 orang
2) Pembina Tingkat I (IV/b)	:	0 orang
3) Pembina (IV/a)	:	2 orang
4) Penata Tingkat I (III/d)	:	5 orang
5) Penata (III/c)	:	8 orang
6) Penata Muda Tingkat I (III/b)	:	3 orang
7) Penata Muda (III/a)	:	3 orang
8) Pengatur Tingkat I (II/d)	:	15 orang
9) Pengatur (II/c)	:	4 orang
10) Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	:	17 orang
11) Pengatur Muda (II/a)	:	3 orang
12) Juru Tingkat I (I/d)	:	8 orang
13) Juru (I/c)	:	4 orang
14) Juru Muda Tingkat I (I/b)	:	- orang
15) Juru Muda (I/a)	:	- orang
Jumlah	:	73 orang

Selain itu, pada Dinas Perhubungan, juga masih terdapat Tenaga Honorer / kontrak dengan rincian lokasi tugas sebagai berikut :

1) Kantor	:	33 orang
2) Terminal	:	46 orang
3) Pintu Perlintasan KA	:	58 orang
4) Parkir	:	<u>13 orang</u>
Jumlah	:	150 orang

c. Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang terdiri dari :

1) Sarjana Strata-2	:	5 orang
2) Sarjana Strata-1/Diploma IV	:	13 orang
3) Diploma III	:	3 orang
4) Diploma II	:	2 orang
5) SLTA/ sederajat	:	23 orang
6) SLTP/ sederajat	:	15 orang
7) SD/ sederajat	:	<u>12 orang</u>
Jumlah		73 orang

Dari keseluruhan pegawai sebanyak 73 orang ASN dan jumlah Tenaga Honorer/kontrak berjumlah 150 orang bertugas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dengan lokasi tugas di Kantor, Terminal, Perlintasan KA dan Perparkiran.

Dilihat dari struktur kepangkatan dan tingkat pendidikan, SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang kurang representatif 4,11% pegawai bergolongan IV dan 26,03 % golongan III, 53,42 % pegawai bergolongan II dan 16,44 % pegawai golongan I dan sebanyak 68,5% berpendidikan SLTA, SLTP dan SD, atau dengan kata lain Dinas Perhubungan belum memiliki SDM yang cukup memadai. Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang juga masih kekurangan SDM untuk diberdayakan di bidang analis.

Untuk meningkatkan kemampuan diperlukan adanya keikutsertaan dalam pelatihan-pelatihan sesuai tupoksinya yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pekerjaan sehari-hari.

2. Tugas Pokok & Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi :

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, maka tugas pokok Dinas Perhubungan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, maka Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya,
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- c. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya,
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. ISU STRATEGIS

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis yang dapat diidentifikasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Tingkat operasi kendaraan angkutan umum yang rendah, dikarenakan pengusaha angkutan umum yang belum memenuhi kualitas standar pelayanan minimum angkutan umum
2. Kurang memadai sarana prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor dan fasilitas pelayanan kendaraan bermotor
3. Adanya rasionalisasi anggaran, sehingga target pengadaan sarana prasarana lalu lintas tidak dapat terrealisasi

C. KEUANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang pada tahun 2021 berasal dari APBD

Pada tahun anggaran 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 11.721.771.000,-

dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.056.775.000,- dan belanja langsung sebesar Rp. 4.664.996.000,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama yang berkaitan langsung dengan sasaran strategis maupun program/kegiatan pendukung.

Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp. 4.664.996.000,- yang didukung oleh 3 program, 18 kegiatan dan 48 sub kegiatan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang merupakan manifestasi komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Tahun 2019 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang.

1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mendasari Visi dan Misi Bupati yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021, Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang mendukung Misi yang ke- 4 yaitu Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dapat dilihat dalam table di bawah ini:

Tabel 2.1. Tabel Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

VISI : Terwujudnya Pemalang Hebat Yang Berdaulat, Berjati diri, Mandiri dan Sejahtera			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
MISI 4 : Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah			
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata	a. Peningkatan pelayanan teknis pemeriksaan berkala kendaraan bermotor;	Peningkatan infrastruktur prasarana dan fasilitas perhubungan
VISI : Terwujudnya Pemalang Hebat Yang Berdaulat, Berjati diri, Mandiri dan Sejahtera			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
		b. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan;	

Dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan dalam strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran. Strategi terdiri dari kebijakan-kebijakan dan program-program. program yang dirumuskan untuk setiap sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tabel Sasaran dan Program

No	Sasaran Renstra	Program
1	Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
2	Meningkatnya infrastruktur, sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang mencantumkan sasaran renstra pada Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan dengan memiliki 3 indikator kinerja utama, yang seluruhnya tercantum dalam dokumen Perjanjian kinerja Dinas Perhubungan tahun 2021, dapat dilihat pada Tabel 2.3. sebagai berikut :

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan
1	Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat	Presentase ketersediaan angkutan umum	%
2	Meningkatnya infrastruktur, sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	Presentase tersedianya terminal angkutan penumpang yang tersedia di Kabupaten	%
		Presentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	%

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang 2016-2021 dengan mengambil target tahun 2021.

B. Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya manajemen organisasi yang baik. Rencana Kinerja akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengecek apakah organisasi telah melaksanakan wewenang yang diamanahkan.

Rencana Kinerja akan berguna apabila dimanfaatkan untuk proses manajemen dalam mencapai hal yang diinginkan. Betapapun tingkat kinerja yang diinginkan mungkin masih bersifat subyektif dan kurang realistis, namun

penetapan rencana kinerja ini masih juga bermanfaat sebagai patok pencapaian target yang diinginkan sendiri oleh manajemen. Secara umum Program yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang pada Tahun Anggaran 2021 terdiri dari 3 program dan 48 sub kegiatan dengan rincian indikator kinerja sebagaimana berikut di bawah ini:

Tabel 2.4. Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat	Presentase ketersediaan angkutan umum	%	3,30
2	Meningkatnya infrastruktur, sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	Presentase tersedianya terminal angkutan penumpang yang tersedia di Kabupaten	%	100
		Presentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	%	60

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang telah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 19.8397.606.000,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 8.397.606.000,- dan Belanja Langsung Rp. 11.000.000.000,- Melalui mekanisme refocusing dan perubahan APBD 2021 menjadi Rp 11.721.771.000,-. Dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 4.664.996.000,- dan Belanja Langsung Rp. 7.056.775.000,-

Adapun target belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang melalui APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Target Belanja APBD Perubahan Tahun 2021

KODE PROG / KEG	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.283.823.500,00
1	Penyediaan jasa surat menyurat	30.300.000,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	220.423.100,00
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	6.400.000,00
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	183.224.000,00
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	189.800.000,00
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.805.600,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	21.965.800,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	109.913.000,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.334.000,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.340.000,00

	17	Penyediaan makanan dan minuman	102.600.000,00
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	126.718.000,00
	19	Penyediaan Jasa Keamanan	270.000.000,00
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	196.683.600,00
	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-
	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	20.342.300,00
	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	10.651.300,00
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	104.640.000,00
	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	30.300.000,00
	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	12.500.000,00
	30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	18.250.000,00
6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	94.823.300,00
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	62.443.600,00
	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	2.149.600,00
	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.828.600,00
	9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	28.401.500,00
9		Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	89.341.800,00
	2	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	89.341.800,00
16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	157.000.000,00
	1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	92.000.000,00
	2	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	45.000.000,00
	9	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana perlintasan KA	20.000.000,00
17		Pogram peningkatan pelayanan angkutan	718.844.500,00
	4	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	364.740.000,00
	5	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	73.630.000,00
	6	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	116.410.000,00
	11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	7.100.000,00
	12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	70.732.000,00
	13	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	49.562.500,00
	15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak angkutan umum teladan kendaraan	23.537.500,00
	16	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	13.132.500,00
19		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	2.124.479.300,00
	1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	365.540.000,00
	2	Pengadaan mark a jalan	22.490.000,00
	4	Pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan	497.620.000,00
	5	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas di Jalan	1.200.084.300,00
	6	Koordinasi dalam Peningkatan pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	38.740.000,00
TOTAL ANGGARAN BELANJA LANGSUNG			4.664.996.000,00

Anggaran belanja langsung Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	(%)	Keterangan
1	Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat	991.576.800	0,21	Didukung oleh dua (2) program: 1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2 Program peningkatan pelayanan angkutan
2	Meningkatnya infrastruktur, sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	2.056.254.200	44,08	Didukung oleh dua (2) program: 1 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 2 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar yang menopang pemerintahan menuju *good governance* sehingga mampu menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

atau

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau

$$\begin{aligned} &\text{Capaian Kinerja Sasaran :} \\ &= \frac{\text{Jumlah indikator tiap sasaran} \times \text{nilai mean tiap sasaran}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\% \end{aligned}$$

ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok" dengan rumus hitungan sebagai berikut:

Adapun dalam penyusunan laporan ini, pedoman yang digunakan untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 91 %	Sangat Baik	
2.	76 - 90 %	Tinggi	
3.	66 - 75 %	Sedang	
4.	51 - 65 %	Rendah	
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah	

A. CAPAIAN KINERJA UTAMA

Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pematang dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pematang Tahun 2016-2021. Selanjutnya, IKU tersebut menjadi kerangka acuan untuk menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dihitung persentase capaian kinerjanya guna menilai sejauh mana sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021.

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Pemalang Tahun 2021 sebagaimana dalam lampiran. Sedangkan masing-masing indikator tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Sasaran Renstra Dinas Perhubungan
Tahun 2021

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat	Prosentase ketersediaan angkutan umum	%	3,30	3,30	100
2	Meningkatnya infrastruktur, sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	Prosentase tersedianya terminal angkutan penumpang yang tersedia di Kabupaten	%	100	100	100
		Presentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	%	60	63	105

Hasil pengukuran kinerja di atas di dapat dari data-data hasil kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2021. Realisasai sasaran strategis tersebut diatas selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja pada setiap sasaran strategis RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang 2016-2021, untuk analisis dan capaian kinerja sasaran strategis tahun 2021 secara lengkap dijelaskan dibawah ini

1. Sasaran 1 : Meningkatkan ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat

Ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat didukung dengan 1 indikator kinerja yaitu prosentase ketersediaan angkutan umum.

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun Lalu		Tahun 2021			RPJMD	
	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir	Kinerja s.d. 2021
Prosentase ketersediaan angkutan umum	17,12	17,81	3,30	3,30	100	9,18	3,30
Persentase Capaian Sasaran 1							

Data jumlah kendaraan angkutan umum yang beroperasi di peroleh dari kegiatan peremajaan SK trayek yang dilakukan 5 tahun sekali dan pembaharuan KP(Kartu Pengawasan) setiap 1 tahun sekali. Adapun jumlah kendaraan yang ditargetkan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025 adalah 303 kendaraan dengan jumlah SK Trayek sebanyak 33 SK, sehingga dari pencapaian indikator ini adalah banyaknya angkutan yang melakukan pembaharuan KP (Kartu Pengawasan) dibagi dengan jumlah SK trayek , pada tahun 2021 sebanyak 109 kendaraan sudah melakukan pembaharuan KP (Kartu Pengawasan) sehingga pada tahun 2021 indikator capaian sasaran 1 sudah tercapai 3,30% dari target yang sudah ditetapkan tahun 2021-2025 yaitu 9,18% .

Sehingga di akhir RPJMD Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang pada indikator sasaran ini harus mencapai target 9,18%. Kurangnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum dan adanya kebijakan pembatasan social berskala besar terutama pelajar yang melakukan kegiatan belajar mengajar melalui via daring mengakibatkan kendaraan angkutan umum yang beroperasi semakin berkurang dikarenakan pendapatan kendaraan angkutan umum rata rata dari para pelajar yang menggunakan angkutan umum. Hal ini mengakibatkan angkutan umum semakin berkurang yang melakukan perpanjangan ijin trayek

Solusi permasalahan di atas adalah :

- a. Melakukan kajian trayek angkutan umum yang ada; yang selanjutnya digunakan untuk menentukan langkah kebijakan kedepan;

- b. Menyiapkan angkutan yang mudah diakses serta nyaman dan Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan konvensional yang sudah ada serta memenuhi protocol kesehatan

Program yang mendukung sasaran adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat adalah program peningkatan pelayanan angkutan
2. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

2. Sasaran 2 : Meningkatnya infrastruktur, sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan

Pada sasaran meningkatkan infrastruktur, sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan didukung dengan 2 indikator kinerja yaitu Presentase tersedianya terminal angkutan penumpang yang tersedia di Kabupaten dan Presentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun Lalu		Tahun 2021			RPJMD	
	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir	Kinerja s.d. 2021
Presentase tersedianya terminal angkutan penumpang yang tersedia di Kabupaten	100	100	100	100	100	100	100,00
Presentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	54,4	55	60	63	105	60	105
Persentase Capaian Sasaran 2					102,5		102,5

Data peningkatan infrastruktur, sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan didapat dari jumlah terminal yang ada di kabupaten

pemalang yang di Kelola oleh Dinas Perhubungan Kab. Pemalang serta jumlah sarana prasarana lalu lintas yang di laksanakan pada tahun berjalan. Adapun faktor pendukung pencapaian sasaran ini adalah sasaran kinerja ini meruapakan salah satu faktor pendukung pada RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021 sehingga kebutuhan anggaran lebih banyak untuk terealisasi, sedangkan factor penghambat capaian kinerja sasaran ini adalah masih belum adanya masterplane lalu lintas sehingga jumlah kebutuhan dan realisasi belum dapat di ukur secara maksimal.

Permasalahan pada indikator Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan adalah :

- a. Belum adanya masterplan lalu lintas di Kabupaten Pemalang, sehingga kebutuhan rambu sampai lima tahun ke depan dapat di ketahui dan lebih terarah

Solusi dari kendala yang ada yaitu :

- a. Pembuatan maspterplan lalu lintas secara bertahap
Program pendukung tercapainya indikator kinerja Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan yaitu :
 - a. Program rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
 - b. Program peningkatan pelayanan angkutan.

Adapun rincian indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

- a. Presentase tersedianya terminal angkutan penumpang yang tersedia di Kabupaten

Presentase tersedianya terminal angkutan penumpang yang tersedia di Kabupaten didapat dari :

$$\frac{\text{Tersedianya Pembangunan Terminal Angkutan Penumpang}}{\text{Jumlah Kebutuhan}} \times 100 \text{ dimana realisasi dari}$$

indikator tersebut adalah jumlah terminal yang telah terbangun sebanyak 8 terminal dan jumlah kebutuhan terminal di Kabupaten Pemalang ada 8 terminal.

Terminal-terminal yang ada di Kabupaten Pemalang yang di Kelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang terdiri dari :

1. Terminal angkutan kota Pemalang ;
2. Terminal Petarukan ;
3. Terminal Comal ;
4. Terminal Grosir Comal ;
5. Terminal Randudongkal ;
6. Terminal Belik ;
7. Terminal Moga ;
8. Terminal Warungpring.

b. Presentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas

Indikator Prosentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas di dapat dengan menggunakan rumus

$$\frac{\text{Jumlah Rambu-rambu yang ada}}{\text{Jumlah Rambu-rambu Seharusnya}} \times 100$$

Jumlah rambu yang ada di kabupaten pemalang sampai dengan tahun 2021 sebanyak 14.843 buah dan jumlah rambu-rambu seharusnya (jumlah rambu yang di butuhkan) sebanyak 23.565,

sehingga di peroleh perbandingan $\frac{14.843}{23.565} \times 100 = 63\%$

Pada tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang sudah melebihi target indikator Prosentase ketersediaan rambu yang telah ditetapkan yaitu 60%

B. AKUNTABILITAS ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran

Dalam upaya untuk mengukur penilaian kinerja capaian keuangan selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung. Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja keuangan per sasaran dihitung dengan membandingkan pagu dan realisasinya. Dari hasil perhitungan

tersebut dapat dianalisis tingkat efisiensi anggaran dari masing-masing capaian sasaran. Berikut ini adalah rekapitulasi capaian kinerja keuangan per sasaran:

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Penyerapan	%
1	Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat	991.576.800	938,077,665	98,25
2	Meningkatnya infrastruktur, sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	2.056.254.200	2,031,670,990	98,80
Jumlah		3.047.831.000	2,969,748,655	98,53

Data di atas di dapat dari serapan anggaran tahun 2021

2. Analisis Efisiensi Sumberdaya

Efisiensi sumberdaya diasumsikan dapat tercapai apabila capaian kinerja telah terpenuhi 100% dan memiliki efisiensi anggaran. Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Penyerapan Anggaran	Capaian (%)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya infrastruktur, sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	2	102,5	2,031,670,990	98,80	1,21
			102,5	2,031,670,990	98,80	1,21

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat diasumsikan bahwa untuk tahun 2021, terdapat 2 (satu) sasaran yang telah mencapai efisiensi sumberdaya, yaitu:

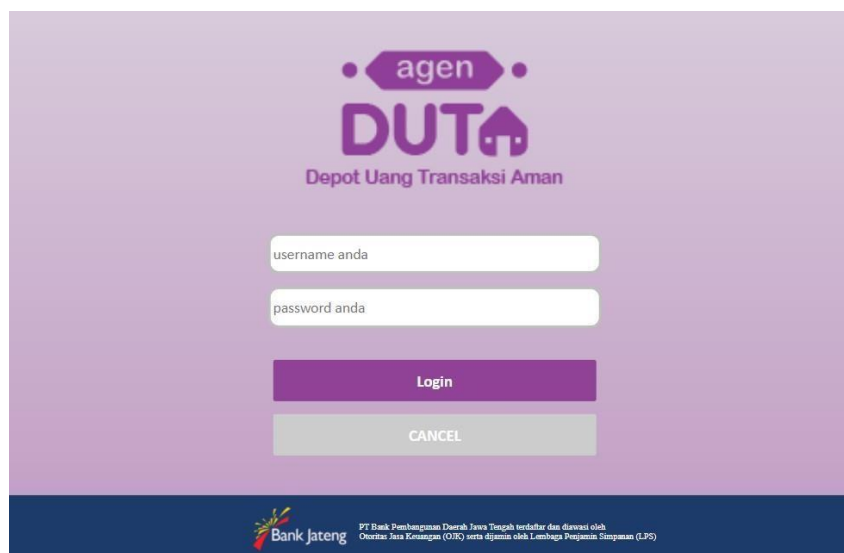
1. Sasaran Meningkatkan ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat dengan Prosentase masing-masing indikator 100%
2. Sasaran Meningkatkan infrastruktur, sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan dengan 2 indikator kinerja dengan prosentase masing-masing indikator 100 % dan 105 % sehingga rata-rata realisasi kinerja pada sasaran Meningkatkan infrastruktur, sarana, prasarana dan

fasilitas perhubungan adalah 102,5% sedangkan serapan anggaran pada sasaran ini 98,80 % sehingga efisiensinya 1,20 %

C. INOVASI

Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang di tahun 2021 melakukan inovasi terkait dengan pelayanan ke masyarakat demi keamanan, keselamatan dan kenyamanan Bersama antara masyarakat penerima layanan Dinas Perhubungan ataupun petugas Dinas Perhubungan. Inovasi tersebut yaitu:

1. Proses pembayaran Pengujian kendaraan bermotor sudah menggunakan non-tunai dengan menggunakan aplikasi laku pandai bank jateng atau bisa melalui ovo, sebelumnya proses pembayaran pada pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang yaitu setelah kendaraan dinyatakan lulus maka pembayaran langsung kepada bendahara yang kemudian disetorkan ke kasda, namun setelah pembayaran dilakukan menggunakan non-tunai maka setelah kendaraan dinyatakan lulus selanjutnya dicetakan billing dan kemudian diberikan kepada pemohon untuk dibayarkan. Pembayaran dapat dilakukan dengan aplikasi laku pandai bank jateng atau ovo. Hal tersebut memberikan kemudahan pemohon karena dapat membayar dimanapun tempat karena pembayaran dilakukan dengan aplikasi dan mewujudkan transparansi antara petugas dan pemohon. Berikut ini adalah contoh aplikasi beserta billing untuk pembayaran non-tunai



KONSTRUKSI KENDARAAN KHUSUS DA

KABUPATEN PEMALANG
DINAS PERHUBUNGAN

Waktu Pendaftaran Pendaftaran	
No. Uj	PEM.4306
No. Kendaraan	G0422VM
Nama	RATYO
Alamat	DEKETE, PITARUKAN RT 0701 PEMALANG
No. Rangka	MH125L413A131134
Mesin	G05A10780127
Tgl. Habis Masa Uji	11-09-2022

Biaya Retribusi Yang Harus Dibayar

1. Retribusi IDP-2020	Rp. 50.000
2. Sewa	
3. Plat Uji	Rp. 0
4. Buku atau Kartu Uji	Rp. 25.000
Jumlah	Rp. 75.000

Pelayanan Cetak
Tanggal Pendaftaran
Nama Pelays

QR CODE

ID BUKU
272022000001661

DASAR PERDAKAB PEMALANG
NO. 15 TAHUN 2018

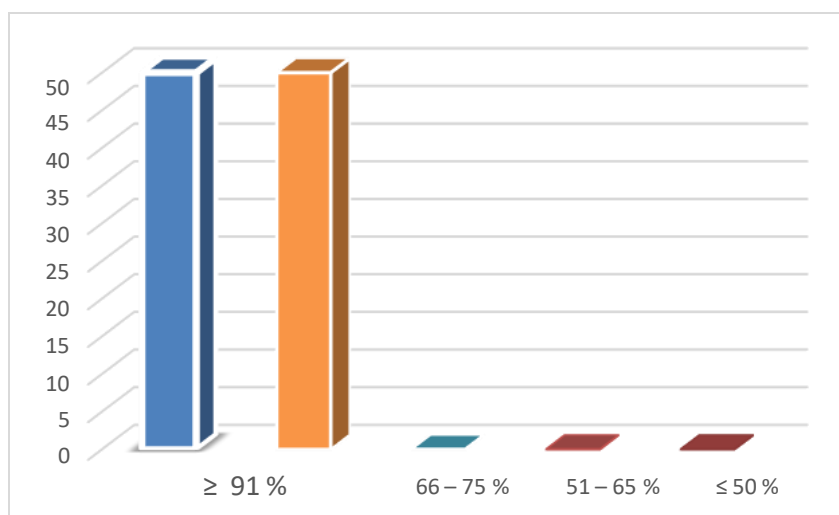
BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang pada Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun terakhir dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan skala peringkat kinerja, dari 2 sasaran strategis, terdapat 50% (1 sasaran) yang tinggi, 50 % (1 sasaran) yang Sangat Tinggi.

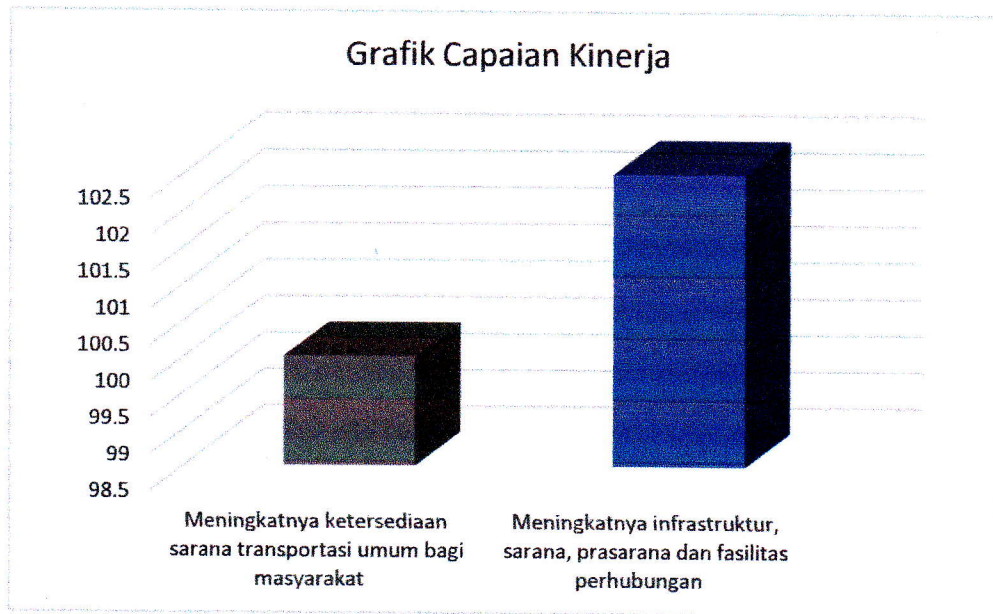
Grafik Capaian Sasaran Kinerja berdasarkan Skala Peringkat Kinerja



Sasaran strategis dengan capaian tinggi adalah sasaran Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat; sedangkan untuk capaian sasaran sangat tinggi pada sasaran Meningkatnya infrastruktur, sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan

2. Berdasarkan pemenuhan capaian kinerja 100%, dari 2 sasaran strategis, terdapat 50% (sasaran 1) yang tinggi atau sebesar 100 %, 50 % (sasaran 2) yang sangat tinggi atau sebesar 102,5 %

**Grafik Capaian Sasaran Kinerja berdasarkan Pemenuhan Capaian
Kinerja 100%**



Adapun langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan melalui Rencana Tindak Lanjut sebagaimana berikut:

1. Menyiapkan angkutan yang mudah diakses serta nyaman dan Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan konvensional yang sudah ada serta memenuhi protokol Kesehatan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor
3. Menganggarkan Kembali pengadaan sarana prasarana perlengkapan jalan di tahun berikutnya.

PEMALANG, 3 JANUARI 2022
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PEMALANG



Drs. MUMINUN., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680526 199403 1 005

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. MUMINUN., MM**
Jabatan : **Kepala Dinas Perhubungan**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MUKTI AGUNG WIBOWO, S.T., M.Si**
Jabatan : **BUPATI PEMALANG**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
BUPATI PEMALANG

MUKTI AGUNG WIBOWO, S.T., M.Si

Pemalang, 2 November 2021
Pihak Pertama,
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. MUMINUN., MM

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 (Perubahan)
DINAS PERHUBUNGAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Jumlah
1	Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat	Prosentase ketersediaan angkutan umum	%	13.79
		Prosentase ketersediaan Angkutan Kota	%	24.502
		Prosentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk pada jaringan jalan kabupaten/kota	%	18.2424
		Prosentase Angkutan pada Daerah tertinggal	%	19.78
		Jumlah kendaraan wajib uji	Kendaraan	6,200
		Prosentase kendaraan umum yang lulus uji emisi	%	60
2	Meningkatnya kualitas pelayanan teknis pemeriksaan berkala kendaraan bermotor	Prosentase halte yang tersedia di kabupaten	%	60
		Prosentase tersedianya terminal angkutan penumpang yang tersedia di Kabupaten	%	100
3	Meningkatnya infrastruktur, sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	Prosentase Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	%	60
		Nilai AKIP Dishub	Skor	CC (53)
4	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah pelanggaran angkutan penumpang dan barang	Kasus	759
5	Menurunnya kasus pelanggaran angkutan barang dan penumpang	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	77
6	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat			

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Jumlah
1	-	Persentase sarana prasarana perlengkapan jalan yang tersedia	%	60
2	-	Persentase persyaratan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal yang terpenuhi	%	70
3	-	Prosentase terwujudnya program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100

No	Program	Anggaran (Rp.)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.047.831.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	0
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.673.940.000
Total Anggaran		11.721.771.000

Pemalang, 2 November 2021
Pihak Pertama,
Kepala Dinas Perhubungan

Pihak Kedua,
BUPATI PEMALANG



MUKTI AGUNG WIBOWO, S.T., M.Si




Drs. MUMINUN., MM



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DINAS PERHUBUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 900 / W / X / 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2016-2021

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perangkat daerah perlu menyusun Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang perlu menyusun Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang;
12. Peraturan Bupati Pematang Nomor 64 Tahun 2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pematang;
13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 92 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pertanian Kabupaten Pematang;
14. Peraturan Bupati Pematang Nomor 58 Tahun 2018 tentang IKU Pemda dan IKU OPD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016-2021.

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Tahun 2016-2021.

KEDUA : Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Peraturan ini adalah :

1. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik,
2. untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang
Pada Tanggal 15 Oktober 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PEMALANG



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
PerhubungKab.Pemalang.
Nomor : 900 / 111 / X / 2018
Tanggal : 15 Oktober 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2016 – 2021

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat	Prosentase ketersediaan angkutan umum	%	$\frac{\text{Jumlah Angkutan}}{\text{Jumlah Penumpang}} \times 100\%$	BIDANG ANGKUTAN
2	Meningkatnya infrastruktur, sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	Prosentase tersedianya terminal angkutan penumpang yang tersedia di kabupaten	%	$\frac{\text{Tersedianya Pembangunan Terminal Angkutan Penumpang}}{\text{Jumlah Kebutuhan}} \times 100\%$	BIDANG ANGKUTAN
		Prosentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	%	$\frac{\text{Jumlah Rambu – rambu yg ada}}{\text{Jumlah Rambu – rambu seharusnya}} \times 100\%$	BIDANG LALU LINTAS

Mengetahui, 15 Oktober 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PEMALANG



AKHMAD BATAH, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600718 198607 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS
IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS
PERHUBUNGAN TAHUN 2021



INSPEKTORAT
KABUPATEN PEMALANG
JL. PEMUDA No.44 PEMALANG

Nomor : 700/50/EVS/2021

Tanggal : 4 Agustus 2021

Jalan Pemuda Nomor 44 Pemalang 52313 Provinsi Jawa Tengah
Telp. / Fax. (0284) 321254



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
INSPEKTORAT**

Pemalang, 4 Agustus 2021

Nomor : 700/50/EVS/2021
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun
2020

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Pemalang
di -

PEMALANG

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang.

Adapun Tujuan evaluasi ini adalah untuk :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
- b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Internal, dan
- e. Capaian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2020 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) / Renja Tahun 2020, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020, serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat" untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria :

NO.	KATE-GORI	NILAI ANGKA	INTERPRESTASI
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan Memimpin perubahan, berbudaya kinerja, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat Baik Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	>60-70	Baik Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup Memadai, akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6.	C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak sekali perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Evaluator menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya memperoleh nilai atau skor sebesar **58,61** dengan kategori **CC (Cukup)** yang dapat diartikan bahwa akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dengan hasil sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	22,15
2.	Pengukuran Kinerja	25 %	10,31
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	9,96
4.	Evaluasi Internal	10 %	4,50
5.	Capaian Kinerja	20 %	11,69
Jumlah		100,00	58,61

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substansif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan guna perbaikan dan penyempurnaan, adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

A. PERENCANAAN KINERJA (30%)

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang 2016-2021 menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program, komponen-komponen Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah. Renstra ini juga menjabarkan potret permasalahan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan, namun demikian masih terdapat kelemahan dalam hal :

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang sudah disusun, namun demikian masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

- Berkaitan dengan reviu Renstra, Evaluator tidak dapat memastikan bahwa dokumen Renstra telah direviu secara berkala.

Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK) sudah disusun, namun demikian masih terdapat beberapa kelemahan terkait perencanaan kinerja tahunan antara lain:

- Dalam Rencana Kinerja Tahunan belum seluruhnya dimanfaatkan untuk penyusunan anggaran.

B. PENGUKURAN KINERJA (25%)

Evaluasi terhadap pengukuran kinerja secara umum dapat dilakukan dengan menilai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal. Berdasarkan pengukuran IKU, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka upaya perbaikan secara berkelanjutan, yaitu:

1. Pengumpulan data kinerja kurang dapat diandalkan. Tidak ada mekanisme pengumpulan data kinerja yang memadai atau terstruktur (jelas mekanisme pengumpulan datanya, siapa yg mengumpulkan data, mencatat, dan siapa yg mensupervisi, serta sumber data yang valid);
2. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*;
3. Evaluator tidak dapat memastikan bahwa dokumen IKU telah direviu secara berkala.

C. PELAPORAN KINERJA (15%)

Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang telah menyusun LkjIP. Namun demikian masih terdapat kekurangan dalam hal :

1. Laporan kinerja belum menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi *outcome*.
Konsepsi akuntabilitas menuntut setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah tidak sekedar berorientasi output, melainkan berorientasi outcome. Pada LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, sebagian informasi pada LKjIP hanya menyajikan capaian yang bersifat *output*, dan belum menyajikan capaian *outcome* atas kinerja yang dicapai di tahun sebelumnya.
2. LKjIP belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya
LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang hanya menyajikan mengenai realisasi capaian keuangan / anggaran, efisiensi yang disajikan berupa efisiensi atas penyerapan anggaran. Tidak terdapat informasi mengenai upaya-upaya efisiensi yang telah dilakukan.
3. Informasi yang disajikan belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja (belum dijadikan dasar pemberian *reward and punishment*)

Informasi yang disajikan belum dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan, serta perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Informasi capaian kinerja dalam LKjIP seharusnya dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan, serta untuk peningkatan kinerja. Namun demikian, sampai dengan saat evaluasi ini dilaksanakan tidak ditemukan cukup bukti bahwa informasi capaian kinerja pada LKjIP telah dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

D. EVALUASI INTERNAL (10%)

Evaluator tidak memperoleh cukup bukti bahwa terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya. Begitu pula dengan evaluasi atas program-program yang dilaksanakan serta evaluasi rencana aksi dalam rangka

mencapai sasaran dan tujuan organisasi, dimana diakui bahwa evaluasi dilakukan hanya saja tidak terdokumentasi dengan baik.

E. PENCAPAIAN SASARAN/ KINERJA ORGANISASI (20%)

Pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang melalui rapat internal (*staff meeting*) terutama pada saat menjelang perubahan anggaran. Sedangkan evaluasi atas program-program yang dilaksanakan serta evaluasi rencana aksi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi, diakui bahwa evaluasi dilakukan hanya saja menurut evaluator belum memenuhi kriteria evaluasi program dan rencana aksi yang seharusnya. Hal tersebut didasarkan pada belum adanya bukti bahwa evaluasi atas program dan rencana aksi telah disertai dengan analisis serta simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu program. Selain itu, belum terdapat analisis tentang perubahan target yang dituju atas program.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang untuk memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja, memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, antara lain dengan:
 - a. memanfaatkan rencana kinerja tahunan dalam penyusunan anggaran dan melakukan monitor serta memanfaatkan rencana aksi atas kinerja.
2. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja, antara lain dengan :
 - a. mengumpulkan data kinerja atas Rencana Aksi secara berkala dengan metode pengumpulan data kinerja yang andal dan mengembangkan penggunaan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja.
 - b. mendokumentasikan dan menyajikan dalam Laporan Kinerja terkait Pengukuran data kinerja untuk kinerja Eselon III dan IV serta memanfaatkan capaian kinerja sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
3. Meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam LKjIP, dengan menyajikan target yang tepat, melakukan pengukuran dan analisis yang memadai terkait realisasi dan capaian seluruh indikator kinerja - lengkap dengan data pendukung perhitungannya, menyajikan informasi *outcome* atas kinerja serta efisiensi penggunaan sumber daya. Membandingkan realisasi dan capaian data kinerja dengan standar-standar lain yang diperlukan, dan menyajikan sumber data yang andal.
4. Meningkatkan kualitas evaluasi internal dengan melakukan pemantauan pencapaian kinerja atas program/kegiatan dan Rencana Aksi, yang lebih memfokuskan kepada hasil

(*outcome*). Evaluasi ini paralel dengan reviu atas program, kegiatan, dan komponen anggaran guna memastikan bahwa anggaran dialokasikan hanya untuk mencapai sasaran strategis. Dan atas evaluasi tersebut supaya terdokumentasikan.

Demikian hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang yang dapat kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt. INSPEKTUR KABUPATEN PEMALANG
Staf Ahli Bupati Pemalang
Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik



EKO EDI PRIHARTANTO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651104 199403 1 008

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan);
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang;
3. Kasubbag Adum pada Inspektorat Kabupaten Pemalang.

INOVASI : PEMBAYARAN NON-TUNAI KIR PKB

agen
DUTA
Depot Uang Transaksi Aman

username anda

password anda

Login

CANCEL

Bank Jateng
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

KABUPATEN PEMALANG
DINAS PERHUBUNGAN

Rakit Pendaftaran Kendaraan	
No. Uj	PML 4336
No. Kendaraan	GG402VM
Nama	RATYO
Alamat	DEK/PEL/PETARUKAN RT.07/11 PEMALANG
No. Rangka	MH125L419A161134
Mesin	015A10781127
Tgl. Habis Masa Uji	11-09-2022

Biaya Retribusi Yang Harus Dibayar

1. Retribusi JBB-2005	Rp. 50.000
2. Denda ...	
3. Pbi. Uj	Rp. 0
4. Biaya atau Kain Uj	Rp. 20.000
Jumlah	Rp. 70.000

Pelayanan Untuk
Tanggal Penulisan
Nama Petugas

QR CODE
010011001
77202300001661

DASAR PERDAKAB PEMALANG
NO. 13 TAHUN 2018